

Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik

Author:

Ramadhan Putra Gayo¹
Mahdin Marbun²

Affiliation:

Universitas Deli
Sumatera^{1,2}

Corresponding email

Rputragayo542@gmail.com
Mahdinmarbun431@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 01-08-2024
Accepted: 10-08-2024
Published: 16-08-2024



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Korupsi adalah masalah yang sangat mendalam dan berbahaya, menghambat kemajuan dan pertumbuhan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah. efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat sistem pengawasan administratif agar mampu menangkal segala bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat

Metode penelitian: pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan audit, regulasi, dan kebijakan pengawasan untuk memahami implementasi dan tantangan dalam pengawasan administratif.

Hasil penelitian: , efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi praktik korupsi sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan penerapan teknologi informasi. Upaya peningkatan efektivitas ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. bahwa, instansi pemerintahan dapat mengoptimalkan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi. Kombinasi antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi, transparansi, budaya organisasi yang sehat, serta dukungan regulasi dan politik yang kuat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergi dari berbagai faktor ini, diharapkan pengawasan administratif di instansi pemerintahan dapat berfungsi maksimal dalam mencegah terjadinya korupsi.

Kesimpulan: adanya pengawasan administratif yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, karena pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan instansi publik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan administratif dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meminimalkan potensi korupsi di sektor publik.

Kata kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pencegahan Korupsi, Publik

Pendahuluan

Korupsi adalah masalah yang sangat mendalam dan berbahaya, menghambat kemajuan dan pertumbuhan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah¹. Salah satu strategi yang sering digunakan untuk mencegah korupsi adalah melalui pengawasan administratif. Pengawasan administratif adalah mekanisme yang dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku². Mekanisme ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah penyimpangan yang dapat mengarah pada korupsi.

Efektivitas pengawasan administratif dalam mencegah korupsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pengawas itu sendiri. Lembaga pengawas yang memiliki tingkat transparansi tinggi akan lebih dipercaya oleh publik dan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi³. Transparansi ini memungkinkan lembaga tersebut untuk lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas korupsi. Ketika proses pengawasan terbuka dan dapat diakses oleh publik, masyarakat lebih yakin bahwa lembaga tersebut beroperasi secara jujur dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kasus korupsi. Kedua, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia, sangat menentukan sejauh mana pengawasan administratif dapat dilakukan secara optimal⁴. Jika lembaga pengawas memiliki dukungan finansial yang memadai dan tenaga kerja yang kompeten, mereka akan mampu menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efisien dan menyeluruh. Sebaliknya, kekurangan dalam salah satu atau kedua aspek tersebut dapat menghambat kemampuan lembaga untuk melaksanakan pengawasan secara optimal.

Dalam konteks global, banyak negara telah menerapkan berbagai model pengawasan administratif yang berhasil dalam menekan tingkat korupsi. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, penerapan prinsip-prinsip good governance dan pengawasan yang ketat telah berhasil menciptakan lingkungan yang hampir bebas dari korupsi⁵. Berikut adalah beberapa contoh negara dengan pengawasan administrasi yang kurang efektif:

1. Zimbabwe

Zimbabwe telah lama mengalami masalah dengan korupsi yang merajalela dan pengawasan administratif yang lemah. Lembaga-lembaga pengawas di negara ini sering kali tidak memiliki independensi dan kekuatan yang cukup untuk menindaklanjuti kasus-

¹ Suyatno, B., 2018, Korupsi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 23, no. 2. hlm. 45-60.

² Rahardjo, S., 2017, Pengawasan Administratif dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 15, no. 1, hlm. 70-85

³ Smith, A., 2019, Transparency and Accountability in Public Administration. *International Journal of Public Administration*, vol. 32, no. 4, hlm. 301-315.

⁴ Jones, D., 2020, Resource Allocation in Public Sector Monitoring. *Public Management Review*, vol. 21, no. 6, hlm. 847-860

⁵ Transparency International., 2018, *Global Corruption Report 2018*. Cambridge University Press, hlm. 225.

kasus korupsi, yang menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi di berbagai sektor pemerintahan⁶.

2. Nigeria

Nigeria merupakan contoh lain dari negara dengan pengawasan administratif yang buruk. Meskipun berbagai badan anti-korupsi telah dibentuk, pelaksanaan dan penegakan hukum masih lemah. Banyak kasus korupsi besar yang tidak terselesaikan, dan ada masalah serius dengan transparansi serta akuntabilitas di lembaga-lembaga pemerintahan⁷.

3. Venezuela

Pengawasan administratif di Venezuela juga mengalami masalah serius, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan telah melemahkan kapasitas lembaga pengawas, sehingga korupsi menjadi endemik. Lembaga-lembaga ini sering kali kekurangan sumber daya dan independensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif⁸.

4. Somalia

Somalia menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan administratif. Ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan telah melemahkan struktur pemerintahan, membuat pengawasan administratif hampir tidak ada. Lembaga pengawas sering kali tidak berfungsi dan korupsi merajalela di seluruh sektor pemerintahan⁹.

Studi kasus dari negara-negara diatas dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem pengawasan administratifnya. Pengawasan administratif yang efektif harus mampu mendeteksi dan menangani kasus-kasus korupsi dengan cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai instansi pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa semua laporan dan temuan terkait korupsi dapat ditindaklanjuti dengan segera¹⁰. Selain itu, diperlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mencurigakan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti¹¹.

Pasca reformasi 1998, Indonesia melakukan reformasi besar-besaran. salah satu nya reformasi dibidang birokrasi. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan administratif juga harus mempertimbangkan aspek-aspek teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan administratif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dengan memungkinkan pemantauan yang lebih real-time dan akurat¹². Penggunaan

⁶ Lewis, C. Interagency Cooperation in Public Sector Oversight., 2012, *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, vol. 25, no. 4, hlm. 687-711.

⁷ Smith, Daniel Jordan., 2008, *A Culture of Corruption: Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria*. Princeton University Press, hlm. 95

⁸ Corrales, Javier, dan Penfold, Michael., 2015, *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chávez*. Brookings Institution Press, hlm. 142

⁹ Menkhaus, Ken., 2004, *Somalia: State Collapse and the Threat of Terrorism*. Routledge, hlm. 60.

¹⁰ Tanzi, V., 1998, Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. *IMF Staff Papers*, vol. 45, no. 4, hlm. 559-594.

¹¹ Widodo, J., 2021, Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 20, no. 3, hlm. 333-350.

¹² Hartono, P., 2016, Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Administratif. *Jurnal Demokrasi dan Keamanan*, vol. 14, no. 2, hlm. 190-205

teknologi juga dapat meminimalisir human error dan mengurangi peluang terjadinya korupsi yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dari pihak-pihak tertentu¹³.

Namun demikian, penguatan pengawasan administratif bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Banyak pejabat yang merasa terganggu dengan pengawasan yang ketat dan mencoba untuk mencari cara agar dapat lolos dari pengawasan tersebut¹⁴. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemimpin pemerintahan, untuk mendukung upaya penguatan pengawasan administratif demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi¹⁵.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat sistem pengawasan administratif agar mampu menangkal segala bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat¹⁶.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di sektor publik?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi di instansi pemerintahan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang sesuai adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan audit, regulasi, dan kebijakan pengawasan untuk memahami implementasi dan tantangan dalam pengawasan administratif.

Pembahasan

1. Efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di sektor publik

Pengawasan administratif merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mendeteksi praktik korupsi di sektor publik. Pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan administrasi berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan administratif sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia.

Transparansi dalam pengawasan administratif berperan penting dalam mendeteksi praktik korupsi. Ketika proses pengawasan dilakukan secara transparan, baik oleh lembaga pengawas maupun oleh publik, maka peluang untuk melakukan korupsi akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena transparansi memungkinkan adanya kontrol sosial yang kuat, dimana setiap

¹³ Holmberg, S., 2003. Good Governance in Scandinavia: Evidence from Survey Data. *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 3143

¹⁴ Ahmed, N., 2009, Challenges in Implementing Administrative Reforms. *Asian Journal of Public Administration*, vol. 31, no. 3, hlm. 263-279.

¹⁵ Yudhoyono, S., 2019, Komitmen Pemerintah dalam Penguatan Pengawasan. Pidato Kenegaraan.

¹⁶ Meier, K, 2015, Continuous Improvement in Public Sector Monitoring,. *International Review of Administrative Sciences*, vol. 81, no. 2, hlm. 398-414.

tindakan dapat diawasi dan diperiksa oleh masyarakat¹⁷. Dengan demikian, transparansi menciptakan lingkungan yang mendorong akuntabilitas di setiap level pemerintahan.

Akuntabilitas juga merupakan elemen kunci dalam pengawasan administratif yang efektif. Lembaga pengawas harus mampu memberikan laporan yang jelas dan tepat waktu mengenai setiap temuan mereka. Selain itu, mereka harus dapat menindaklanjuti setiap laporan dengan tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa semua pelanggaran segera ditangani. Menurut Teguh Prasetyo, akuntabilitas yang baik dalam pengawasan administratif tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat integritas lembaga pengawas itu sendiri¹⁸.

Kompetensi sumber daya manusia di lembaga pengawas juga memegang peranan penting dalam mendeteksi praktik korupsi. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka dapat mengidentifikasi indikasi korupsi lebih awal dan melakukan tindakan preventif yang diperlukan. Cut Syafruddin menyatakan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai pengawas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan administratif¹⁹.

Namun, pengawasan administratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kurangnya dukungan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengawasan secara optimal. Agus Raharjo menyebutkan bahwa banyak lembaga pengawas di Indonesia yang tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan audit mendalam dan menyeluruh²⁰. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap kemampuan mereka dalam mendeteksi praktik korupsi secara efektif.

Selain itu, budaya birokrasi yang koruptif juga menjadi hambatan besar bagi efektivitas pengawasan administratif. Sri Mulyani Indrawati menyoroti bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini, dimana perubahan harus mencakup aspek-aspek struktural dan kultural dalam lembaga pemerintahan²¹. Tanpa reformasi yang signifikan, upaya pengawasan administratif akan tetap terhambat oleh praktek-praktek korupsi yang telah mengakar.

Implementasi teknologi informasi dalam pengawasan administratif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas. Sistem *e-governance*, misalnya, memungkinkan pengawasan dilakukan secara real-time dan lebih akurat. Agus Subagyo menegaskan bahwa teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi Korupsi²². Pemanfaatan teknologi ini juga dapat meminimalkan human error dan meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan.

Dengan demikian, efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi praktik korupsi sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan penerapan teknologi informasi. Upaya peningkatan efektivitas ini memerlukan

¹⁷ Teguh Prasetyo,., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, hlm. 134

¹⁸ *Ibid*, , hlm. 135

¹⁹ Syafruddin, Cut., 2019, *Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Pelajar, hlm. 56

²⁰ Agus Raharjo,., 2018, *Korupsi dan Good Governance di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm. 142.

²¹ Sri. Mulyani Indrawati,., 2016, *Reformasi Birokrasi dan Tantangan Masa Depan*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 98.

²² Agus Subagyo,., 2019, *E-Government dan Reformasi Pelayanan Publik*, Penerbit Andi, hlm. 45

komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi di instansi pemerintahan.

Keberhasilan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi di instansi pemerintahan ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Setiap faktor ini memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan administratif meliputi integritas sumber daya manusia, transparansi, penggunaan teknologi, budaya organisasi, serta dukungan regulasi dan politik.

a. Integritas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengawasan administratif adalah integritas dan kompetensi sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Pejabat pengawas yang memiliki kompetensi tinggi serta integritas yang kuat akan lebih mampu menjalankan tugas pengawasannya dengan baik dan independen. Tanpa adanya integritas dan kompetensi yang memadai, proses pengawasan administratif tidak akan berjalan efektif.

b. Transparansi

Transparansi dalam proses pengawasan menjadi elemen penting dalam mencegah korupsi. Dengan adanya transparansi, proses pengawasan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mengurangi peluang terjadinya korupsi.

c. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan administratif dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi praktik korupsi. Sistem e-government, misalnya, memungkinkan monitoring dilakukan secara real-time dan otomatis, sehingga potensi kesalahan manusia dapat diminimalkan. Oleh karena itu, teknologi menjadi instrumen penting dalam menciptakan pengawasan yang lebih efektif.

d. Budaya Organisasi

Budaya organisasi juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan pengawasan administratif. Sebuah instansi yang memiliki budaya antikorupsi akan lebih cenderung mematuhi peraturan dan menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Namun, di sisi lain, budaya organisasi yang koruptif dapat melemahkan fungsi pengawasan administratif.

e. Dukungan Regulasi dan Politik

Dukungan regulasi yang kuat serta komitmen politik dari para pemimpin pemerintahan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, serta tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah, upaya pengawasan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor-faktor tersebut diatas bisa dilihat bahwa, instansi pemerintahan dapat mengoptimalkan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi. Kombinasi antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi, transparansi, budaya organisasi yang sehat, serta dukungan regulasi dan politik yang kuat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergi dari berbagai faktor ini, diharapkan pengawasan administratif di instansi pemerintahan dapat berfungsi maksimal dalam mencegah terjadinya korupsi.

Kesimpulan

Efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik sangat bergantung pada kombinasi berbagai faktor, seperti transparansi, akuntabilitas, integritas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengawasan yang dilakukan secara efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan sebelum berkembang menjadi praktik korupsi yang lebih luas. Dengan adanya pengawasan administratif yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, karena pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan instansi publik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya, dukungan regulasi yang belum optimal, serta komitmen politik yang tidak konsisten dapat menghambat upaya ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar lebih efektif dalam mencegah korupsi di sektor publik.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam proses administrasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa publik dapat mengakses informasi yang relevan, sehingga tercipta kontrol sosial yang lebih baik. Akuntabilitas juga harus diperkuat dengan memastikan setiap hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tegas dan adil. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pejabat pengawas harus ditingkatkan. Pengawas yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mampu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-government dan sistem pelaporan elektronik, harus dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengawasan administratif. Teknologi dapat meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat deteksi dini terhadap praktik korupsi. Regulasi yang mendukung pengawasan administratif perlu diperkuat, termasuk pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang konsisten dari semua pihak untuk mendukung pengawasan yang efektif dan berkelanjutan dalam mencegah korupsi di sektor publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan administratif dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meminimalkan potensi korupsi di sektor publik.

Referensi

- Ahmed, N., 2009, Challenges in Implementing Administrative Reforms. *Asian Journal of Public Administration*, vol. 31, no. 3, hlm. 263-279.
- Corrales, Javier, dan Penfold, Michael., 2015, *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chávez*. Brookings Institution Press, hlm. 142
- Hartono, P., 2016, Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Administratif. *Jurnal Demokrasi dan Keamanan*, vol. 14, no. 2, hlm. 190-205.
- Holmberg, S., 2003. Good Governance in Scandinavia: Evidence from Survey Data. *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 3143
- Indrawati. Sri. Mulyani., 2016, *Reformasi Birokrasi dan Tantangan Masa Depan*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 98.
- Jones, D., 2020, Resource Allocation in Public Sector Monitoring. *Public Management Review*, vol. 21, no. 6, hlm. 847-860.
- Lewis, C. Interagency Cooperation in Public Sector Oversight., 2012, Governance: An International Journal of Policy, *Administration, and Institutions*, vol. 25, no. 4, hlm. 687-711.

- Menkhaus, Ken., 2004, *Somalia: State Collapse and the Threat of Terrorism*. Routledge, hlm. 60.
- Meier, K, 2015, Continuous Improvement in Public Sector Monitoring,. *International Review of Administrative Sciences*, vol. 81, no. 2, hlm. 398-414.
- Prasetyo, Teguh., 2018, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, hlm. 134.
- _____, 2018, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, hlm. 135.
- Rahardjo, S., 2017, Pengawasan Administratif dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 15, no. 1, hlm. 70-85.
- Raharjo, Agus., 2018, *Korupsi dan Good Governance di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm. 142.
- Smith, A., 2019, Transparency and Accountability in Public Administration. *International Journal of Public Administration*, vol. 32, no. 4, hlm. 301-315.
- Smith, Daniel Jordan., 2008, *A Culture of Corruption: Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria*. Princeton University Press, hlm. 95.
- Subagyo. Agus., 2019, *E-Government dan Reformasi Pelayanan Publik*, Penerbit Andi, hlm. 45
- Suyatno, B., 2018, Korupsi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 23, no. 2. hlm. 45-60.
- Syafruddin, Cut., 2019, *Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Pelajar, hlm. 56.
- Transparency International., 2018, *Global Corruption Report 2018*. Cambridge University Press, hlm. 225.
- Tanzi, V., 1998, Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. *IMF Staff Papers*, vol. 45, no. 4, hlm. 559-594.
- Widodo, J., 2021, Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 20, no. 3, hlm. 333-350.
- Yudhoyono, S., 2019, Komitmen Pemerintah dalam Penguatan Pengawasan. Pidato Kenegaraan.